

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- , 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67
- Asikin, Zainal dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada.
- H.S, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilmar, Aminuddin, 2010, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Piliham Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- S.F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Mas, Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Bachsan, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Setiawan, Yudhi, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Simamora, Y. Sogar, 2021, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifudin, Ateng, 2010, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: PT. Galamedia Bandung Perkasa.
- Supranto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Visi Indonesia 2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019, *Background Study Visi Indonesia 2045*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Utrecht, Moh. Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- Whitticks, Edward, 2005, *Construction Contract, How to Manage Contract and Control Disputes in a Volatile Industry*, Texas: Gulf Publishing Company.
- Yuslim, 2017, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa

C. MAKALAH/JURNAL/HASIL PENELITIAN/KAMUS/WEBSITE

Alidatussadiyah Almuslimah, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol 12 No. 2 Desember 2021

Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah, Jurnal Ius Quia Iustum, Nomor 4 Volume 24, Oktober 2017.

Merry Tjoanda, Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal SASI Volume 26 No.3, Juli-September 2020.

Muskibah dan Lili Naili Hidayah, Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum, Volume 4 No.2 April 2020.

Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 24 No 2 Desember 2017.

- Roseno Napu Setiawan, Yohanes G Tuba Helan, Saryono Yohanes, Wewenang dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, *Arena Hukum* Volume 12 Nomor 3, Desember 2019.
- Suanro, Mizan Malik S, Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Penafsiran Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Volume 6 Nomor 2, September 2021.
- Muhammad Hasbi, 2018, “Perbuatan Tidak Merugikan dalam Kaitannya dengan Kontrak Konstruksi Indonesia”, Disertasi Universitas Andalas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022, *Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR Laksanakan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini TA 2022*, <https://pu.go.id/berita/percepat-pembangunan-infrastruktur-kementerian-pupr-laksanakan-penandatanganan-kontrak-paket-tenderseleksi-dini-ta-2022>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019, *Tahapan Krusial dalam Pelaksanaan PBJ*, <https://ulp.pu.go.id/berita/66/tahapan-krusial-dalam-pelaksanaan-pbj>.
- LKPP, 2021, Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- LKPP, 2021, Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1, Jenis Kompetensi Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- LKPP, 2021, Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar Materi 8: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2, <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/60499064/pengumumanlelang>.